

**PERAN KESBANGPOL DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR
ORMAS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1)

Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



MUHAMMAD FACHRURROZI
Nim. 2019BID086

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

Muhammad Fachrurrozi

**Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas di Kabupaten
Lombok Timur**

Muhammad fachrurrozi : Ayatullah Hadi, Rifaid

Abstrak

Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur masih banyak terjadi. Pembinaan terhadap Ormas harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol. Dalam penanganan konflik ini masih membuat masyarakat dari Ormas kurang paham terkait maksud dan tujuan pembinaan yang dilakukan Kesbangpol.

Hal ini membuat peneliti ingin meneliti peran Kesbangpol dalam menangani Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan wawancara. Penelitian ini memberikan hasil dimana masih terdapat banyak konflik antar Ormas yang terjadi, kemudian penanganan dari pemerintah sangat diperluhkan. Kesbangpol dalam hal ini merupakan bagian dari pemerintah berperan penting dalam mengatasi konflik dengan cara yang sesuai dengan aturan seperti melakukan Observasi, Deteksi Dini, dan Mediasi. Sehingga peran Kesbangpol dalam menangani konflik antar Ormas dinilai sudah cukup baik dengan berbagai proses dan tahapan yang sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam menangani Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur yaitu Observasi, Deteksi Dini, dan Mediasi.

Kata kunci : Kesbangpol; Konflik; Organisasi Masyarakat (Ormas).

The Role of Kesbangpol in Handling Conflicts Between Organizations in East Lombok Regency

Muhammad Fachrurrozi: Ayatullah Hadi, Rifaid

Abstract

Conflicts between mass organizations in East Lombok Regency still occur a lot. Mass organization coaching must be carried out gradually based on the duties and functions of Kesbangpol. Handling this conflict still makes people from mass organizations less aware of the aims and objectives of the guidance carried out by Kesbangpol. It makes researchers want to examine the role of Kesbangpol in handling conflicts between mass organizations in the East Lombok Regency. The method used is qualitative, and data is collected by interview. This research provides results where there are still many conflicts between mass organizations, so handling from the government is needed. Kesbangpol, in this case, is part of the government and plays an essential role in overcoming conflicts by following the rules of conducting observation, early detection, and mediation. Thus, the role of Kesbangpol in handling disputes between mass organizations is considered good enough with various processes and stages following applicable rules and regulations. Therefore, it can be concluded that the role of Kesbangpol in handling conflicts between mass organizations in East Lombok Regency is observation, early detection, and mediation.

Keywords: *Kesbangpol; Conflict; Community Organization (Ormas).*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan semua masyarakat Indonesia. Dasar pemberlakuan disemua bidang ialah Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Pembangunan sosial politik menjadi salah satu unsur pembangunan nasional yang biasa dilihat sebagai sarana bagi unsur pembangunan lainnya. Dalam hubungannya dengan proses modernisasi sistem politik itu terutama ditentukan oleh efektifitasnya untuk menciptakan kondisi yang dapat menyentuh harapan serta keinginan rakyat untuk maju dan berkembang, karena bila sekedar keinginan sekelompok masyarakat tidaklah mungkin dapat membawa ke dalam proses modernisasi dalam arti kata yang sebenarnya (Suryahartati et al., 2022)

Lebih lanjut, dalam hubungannya dengan pembangunan di bidang politik Alpian dan Nazaruddin Syamsuddin (dalam Efiyanti 2018) menyampaikan “Pembangunan politik yang dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi dimasa depan dan memang patut mendapat perhatian kita karena masyarakat itu kita ketahui terus menerus mengalami perubahan, apabila pada masa – masa akhir ini perubahan berlangsung begitu cepatnya sehingga lahir ucapan seperti “*Multipe revolution in one generation*”, “*The past and the future overlap*” dan sebagainya. Mengingat hal itu, memang kondisi kemasyarakatan pada masa kini, antara lain masyarakat yang

semakin maju, sehingga hasil komulatif dari berbagai factor perubahan sosial-perubahan social baik yang bersifat global, regional maupun rasional, pembangunan politik kita lakukan dimasa depan wajib mengantisipasi berbagai perkembangan yang mungkin akan terjadi dimasa depan itu.”

Selanjutnya, pembangunan dalam bidang sosial politik dan pematapan sadar akan kehidupan berpolitik perlu bagi setiap warga, demi tercapainya Demokrasi Pancasila hingga dapat menjamin kelancaran usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dasar hukum untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan berpolitik di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun dengan tulisan dan sebagainya (Rendy Adiwilaga et al., 2023).

Lebih lanjut, dari ketentuan Pasal 28 tersebut dapatlah diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara tulisan maupun lisan. Untuk tercapainya stabilitas dan kemandirian di bidang sosial dan politik haruslah diusahakan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semakin kokohnya kehidupan yang konstitusional, demokrasi dan dasar hukumnya dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat bagi tercapainya stabilitas yang baik (Hakim, 2022).

Lebih jauh, untuk meningkatkan pertumbuhan sosial dan politik, pemerintah harus mendorong inovasi masyarakat, menumbuhkan semangat hidup, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan.

Pemerintah diberi mandat untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi pengembangan kehidupan sosial-politik dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kemajuannya. Sebaliknya, masyarakat diharapkan untuk bereaksi terhadap arahan dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah dan menumbuhkan lingkungan ini melalui tindakan nyata (Rohmanudin, 2021).

Lebih jauh, keterlibatan sejati melibatkan partisipasi dalam organisasi sosial politik dan kelompok masyarakat yang sudah mapan untuk mendorong kontak sosial timbal balik antara masyarakat dengan dirinya sendiri, serta antara masyarakat dengan pemerintah. Inisiatif ini secara efektif mendorong keterlibatan masyarakat untuk meredakan konflik antara organisasi massa dan pemerintah, serta antara masyarakat dengan otoritas pemerintah (Zulianto et al., 2020).

Untuk melaksanakan peran secara efektif, diperlukan peningkatan kinerja dari setiap individu dan pemimpin dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Ketika seorang individu memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, maka ia telah melaksanakan perannya. Peran menandakan perilaku yang diharapkan terkait dengan jabatan tertentu. Pekerjaan terkait erat dengan status, karena mencakup unsur-unsur status yang dinamis, termasuk hak dan kewajiban yang dijunjung tinggi oleh seorang individu (Putra, 2020).

Selain itu, konflik sosial biasanya mencakup serangkaian peristiwa mulai dari pertikaian antarpribadi dan konflik kelas hingga konflik yang berpuncak pada peperangan internasional. Tidak ada teori konflik sosial

yang dapat merangkum semua peristiwa ini. Coser mencirikan konflik sosial sebagai perebutan status yang langka, di mana kekuasaan dan sumber konflik dinetralisir atau diberantas oleh musuh (Jufanda, 2021).

Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar (Medellu et al., 2023).

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan; atau perbedaan; pertentangan berlawanan dengan; atau berselisih dengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik mempunyai arti percekocokan; perselisihan; dan pertentangan. Sedangkan menurut kamus sosiologi konflik bermakna *the overt struggle between individuals or groups within a society, or between nation states*, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa (Mandak et al., 2022).

Melihat banyak Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang hadir dalam lingkungan daerah Kabupaten Lombok Timur, menjadinya peran yang sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistem Demokrasi Pancasila dan seperti apa menciptakan suatu mekanisme politik sehingga dapat menjaga kestabilan politik. Sehingga tugas dan fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur terlaksana sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan itu. Tetapi dalam hal ini masih sering terjadi konflik. Tawuran yang terjadi di wilayah Bagek Papan dapat yang tidak kenal waktu ini bahkan juga terjadi pada saat perayaan hari besar Idul Adha pada Jum'at (1 September 2017). Hari yang seharusnya menjadi hari suci bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadi penghambat bagi kelompok warga yang melakukan aksi kekerasan di antara mereka, (Kesbangpol, 2017)

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bupati Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini dibantu oleh Kantor KESBANGPOL Kabupaten Lombok Timur sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. KESBANGPOL-Kabupaten Lombok Timur merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi (Mediawati, 2019).

Tabel 1.1
Data Konflik Ormas di Kabupaten Lombok Timur (2018-2020)

Tanggal Publikasi	Lokasi	Konflik
19 Mei 2018	Kecamatan Sakra	Warga dengan Ormas Ahmadiyah
2 Januari 2022	Kecamatan Selong	100 Warga menyerang Ponpes Assunah
4 Januari 2022	Kecamatan Pancor	NW Pancor dan NW Anjani

Sumber: Bakesbangpoldagri Lombok Timur, 2022

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di KESBANGPOL Kabupaten Lombok Timur pembinaan terhadap organisasi masyarakat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah yaitu masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut bahkan konflik antar ORMAS di Kabupaten Lombok Timur makin marak terjadi. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilihat dari permasalahan di atas maka tujuannya adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat bagi para peneliti yang mengangkat judul yang sama dan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi penulis tentang kajian mengenai Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur secara khusus, dan kajian ilmu pemerintahan secara umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pihak daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkaitan untuk melihat Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Lombok Timur biasanya disebabkan karena perbedaan paham antar masyarakat dan pemberian aset yayasan yang tidak sesuai salah satu pihak, sehingga KESBANGPOL disini berperan dengan menerapkan 3 metode yaitu observasi atau pengamatan, deteksi dini konflik untuk mencegah konflik semakin membesar, dan mediasi yaitu pendekatan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik.

1. Dalam variabel *Aracted Role* menjelaskan bahwa suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur sendiri dalam menangani berbagai macam konflik dari konflik sosial maupun konflik antar Ormas. Kesbangpol Lombok Timur dalam melakukan penanganan tidak semerta-merta dengan penanganan secara instan tetapi ada prosedur dan menjalankan regulasi sesuai payung hukum dan aturan yang sudah ada.
2. Dalam Variabel Role Konflik Dalam hal ini yaitu Kesbangpol kabupaten Lombok Timur yang menjadi penengah atau jalan alternatif bagi persoalan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu Kesbangpol Lombok Timur memberikan suatu wadah untuk pelaku konflik guna melakukan mediasi dll berharap apa yang ditangani bisa terselesaikan dengan baik dan bertujuan agar menghadirkan kesinambungan diantara masyarakat Lombok Timur

khususnya Ormas yang terlibat konflik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, KESBANGPOL dapat mempertahankan kredibilitas dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan peranan lebih lanjut sehingga nantinya dapat mencegah melebarnya suatu konflik. Dengan penanganan dan peran KESBANGPOL yang baik maka nantinya akan menjamin kenyamanan dan keamanan di masyarakat.

